



**PENGARUSUTAMAAN BERAGAMA DALAM
RUANG LINGKUP DIGITAL BAGI MAHASISWA
PERGURUAN TINGGI**

***MAINSTREAMING RELIGION IN THE DIGITAL
SCOPE FOR UNIVERSITY STUDENTS***

Kisno Umbar,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten-Indonesia
kisno@uinjkt.ac.id

Moh. Iqbal Bulgini

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Kaliwates, Jember, Jawa Timur-Indonesia
bulgyneiqbal@gmail.com

Artikel diterima 7 Mei 2023, diseleksi 8 Mei 2023, disetujui 23 Mei 2023

Abstract

This article is aimed at examining the transformation and transmission of religious moderation in PTKI and PTN in the digital realm and understanding intelligence in utilizing information, media and technology for the purpose of maintaining religious moderation when confronted with religious narratives. This article was written using a qualitative approach that emphasizes the interpretation of researchers in looking at existing data and facts, the writing method uses a library research approach. The researcher examines ideas about religious moderation through publication data related to moderation that are then tabulated and classified and interpreted to be able to answer

the objectives of this study. This article reveals that mainstreaming religious moderation cannot move alone, but must go hand in hand to achieve the desired target. What is done by the Islamic Religious College in mainstreaming religious moderation in the digital space is a form of awareness that finds its relevance along with religious issues in cyber space. Belief in the values of moderation and togetherness then disappears, eaten up by religious narratives that are tendentious and highlight the fanaticism of truth. Joint efforts to build moderation need support from the policies of the Ministry of Religion in collaboration with the Ministry of Education, Culture, Research and Technology to strengthen religious moderation, one of which is by establishing religious moderation houses at PTUs in Indonesia.

Keywords: : Religious Moderation; cyber space; PTKI; PTU

Abstrak

Artikel ini ditujukan menelaah transformasi dan transmisi moderasi beragama yang ada di PTKI dan PTN dalam ranah digital dan memahami kecerdasan dalam memanfaatkan informasi, media dan teknologi. Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penulisannya menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Peneliti menelaah gagasan-gagasan tentang moderasi beragama melalui data-data publikasi terkait moderasi yang ada kemudian ditabulasi dan diklasifikasi serta diinterpretasi untuk dapat menjawab tujuan dari penelitian ini. Artikel ini mengungkapkan bahwa pengarusutamaan moderasi beragama tidak bisa bergerak sendiri, namun harus berjalan beriringan untuk mencapai target yang diinginkan. Apa yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengarusutamakan moderasi beragama dalam ruang digital merupakan bentuk kesadaran yang menemukan relevansinya seiring isu-isu keagamaan di cyber space. Kepercayaan terhadap nilai moderasi dan kebersamaan kemudian lenyap dimakan oleh narasi keagamaan yang tendensius dan menonjolkan fanatisme kebenaran. Upaya bersama dalam membangun moderasi perlu didukung dari dari kebijakan Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk penguatan moderasi beragama, salah satunya dengan pendirian rumah moderasi beragama di PTU yang ada di Indonesia.

Kata kunci: Moderasi Beragama; Cyber Space; PTKI; PTU

PENDAHULUAN

Moderasi beragama telah menjadi topik perhatian internasional sejak lama. Bentuk perhatian internasional tersebut dibuktikan dengan upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tahun 2019 tersebut sebagai The International Year of Moderation (Nations, 2022).

Bahkan, PBB secara terang mengakui bahwa pendekatan moderasi dapat memperkuat kemajuan tiga pilar PBB, yaitu perdamaian dan keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia; mengakui pentingnya inklusi, saling menghormati, toleransi dan pengertian; memilih negosiasi daripada konfrontasi dan bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih aman dan damai; menyambut upaya dan inisiatif yang relevan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dalam mempromosikan moderasi dan mendorong inklusi yang lebih besar; dan menghormati keragaman, pemahaman, toleransi dan kerja sama di antara orang-orang yang berbeda budaya, agama dan kepercayaan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang juga memiliki perhatian besar atas wacana tentang moderasi beragama tersebut. Perhatian tersebut dibuktikan dengan upaya Kementerian Agama Republik Indonesia era Lukman Hakim Syaifuddin menetapkan tahun 2019 sebagai “Tahun Moderasi Beragama” (Kemenag, 2022a). Moderasi beragama menjadi ruh dan kata kunci yang harus menjiwai seluruh program pelayanan agama dan keagamaan di Kementerian Agama. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, institusi ini berupaya untuk memegang prinsip moderat di tengah keragaman dan tekanan era disrupsi yang berdampak pada aspek kehidupan keagamaan dan kebangsaan.

Moderasi beagama biasa dipahami sebagai sikap tengah dalam memahami ajaran agama atau juga bisa dipahami sebagai upaya sadar dan sistematis untuk mentransformasikan sikap toleran dan inklusif dalam diri peserta didik dalam konteks beragama, berbangsa dan bernegara (Abdul Aziz et al., 2019, p. 15). Dalam konteks ini, Hefni menjabarkan bahwa moderasi merupakan upaya membawa masyarakat dalam pemahaman yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama di tengah masyarakat yang multikultural, dan juga tidak mendewakan rasio yang berpikir bebas tanpa batas (Hefni, 2020).

Di tengah arus disrupsi, narasi keagamaan yang moderat tidak hanya menjadi kebutuhan personal atau kelembagaan, melainkan secara umum bagi warga dunia, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi dalam menghadapi kapitalisme global dan politik percepatan yang disebut dengan era digital. Penerjemahan nilai agama yang moderat tidak cukup pada implemetasi yang digaungkan di kementerian agama saja, tetapi juga harus dapat di terjemahkan dalam mata pelajaran agama di sekolah dasar baik keagamaan maupun sekolah umum mulai dari tingkat dasar (SD) hingga perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) atau Perguruan Tinggi Umum (PTU). Pasalnya, bila nilai moderasi tidak diterjemahkan dalam pelajaran agama di sekolah, narasi moderasi tidak pernah sampai pada peserta didik yang ada. Dari penelitian yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), narasi keagamaan yang didapatkan siswa saat ini hanya terbatas pada mata pelajaran kuliah, internet dan organisasi keagamaan; mata kuliah agama Islam-nya juga belum ideal ditinjau dari proporsinya untuk mengajarkan nilai moderasi; keterbatasan waktu pengajar untuk memasukkan materi-materi moderasi; juga ditemukan fakta menarik bahwa anak yang tidak terkoneksi dengan internet memiliki opini lebih moderat dibandingkan dengan mereka yang terkoneksi internet (PPIM, 2018).

Bagaimana jika ditinjau dari aspek wawasan beragama yang berkembang di dunia digital? Di dalam dunia maya yang dikendalikan oleh kecepatan informasi elektronik, eksistensi manusia mengalami transformasi mendasar dari sebuah bentuk tubuh yang bergerak di dalam ruang, menjadi sebetuk tubuh yang diam di tempat dan hanya mampu menyerap setiap informasi yang lewat melalui simulasi elektronik (Wahyudi and Kurniasih, 2021). Ruang digital kemudian menjadi arena kontestasi dan kompetisi. Temuan riset dari PPIM mengungkapkan beberapa hal diskursus keagamaan di dunia maya, didominasi oleh pemahaman konservatisme dengan presentase 67.2%, disusul oleh paham moderat,

liberal, dan islamis; konteks politik berperan penting dalam konstruksi narasi agama di media sosial. Penggunaan narasi keagamaan untuk kepentingan politik berdampak pada peningkatan paham konservatisme agama; akun dengan pandangan yang islamis dan konservatif mendominasi viralitas *tweet* keagamaan. Sedangkan akun moderat masih lebih sedikit dibandingkan dengan akun kategori sebelumnya; dalam semua kategori paham keagamaan, perempuan memiliki proporsi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Narasi gender dan agama di media sosial didominasi oleh narasi konservatif terkait perempuan yang cenderung menolak ide kesetaraan gender; Setiap akun sosial media memiliki kesempatan untuk memegang otoritas dan pengaruh yang tinggi dalam menyebarkan narasi agama meskipun dengan basis follower kecil atau tanpa otoritas keagamaan yang sah (PPIM, 2020).

Pada ruang tersebutlah, dunia digital dimanfaatkan oleh segelintir kelompok untuk menyemai konflik dan menghidupkan politik identitas. Ruang digital itu kini lebih condong didominasi nilai keagamaan yang menjurus kepada eksklusivitas. Tidak hanya itu, ajaran-ajaran agama dipertentangkan dengan kebijakan-kebijakan negara. Kondisi demikian sangat mengkhawatirkan karena dapat menggeser otoritas keagamaan serta menumbuhkan peremajaan Ulama. Bagaimana tidak, otoritas keagamaan tidak lagi dipegang oleh para Ulama yang otoritatif dan kredibel.

Dalam menyikapi problem tersebut, upaya langkah Kementerian Agama sebagai peletak dasar program tersebut patut diapresiasi. Ia telah merilis beberapa kebijakan turunan, seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama. Kementerian Agama juga telah menerbitkan buku Gerak Langkah Pendidikan Islam untuk Pendidikan

Moderasi Beragama: Moderasi Beragama Seri 1, Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Moderasi Beragama Seri 2 (Kemenag, 2019), Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam: Moderasi Beragama Seri 3 (Abdul Aziz et al., 2019). Selain buku tersebut, secara paktis Kementerian Agama juga telah merilis empat buku pedoman moderasi beragama, yaitu; buku saku moderasi beragama bagi guru; buku modul pelatihan penguatan wawasan moderasi bagi guru; pedoman mengintegrasikan moderasi pada mata pelajaran agama; dan buku pegangan siswa (K. Kemenag, 2022).

Jika dikaitan dengan problem yang ada di dunia digital, bagaimana untuk penguatan moderasi beragama di perguruan tinggi? Hasil penelitian Hefni, mengungkapkan dunia digital menyediakan prasmanan narasi keagamaan yang bebas akses. Kelompok tertentu seringkali memanfaatkannya untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan politik. Kondisi tersebut, menurut Hefni, moderasi beragama di ruang digital menemukan momentumnya, dalam hal ini Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai laboratorium perdamaian kemudian menguatkan konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi yang deras di ruang media sosial (Hefni, 2020). Temuan dalam penelitian tersebut hanya memberikan informasi bahwa kondisi sekarang ini menjadi momentum yang tepat dalam penguatan moderasi beragama dalam dunia digital.

Hanya saja, peneliti belum menemukan langsung buku saku pedoman moderasi beragama di dunia digital untuk PTKI dan PTU. Yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini ialah bagaimana penguatan moderasi beragama tersebut dapat dilakukan dengan praktis dan terstruktur khususnya untuk mewarnai isu yang moderat di dunia digital. Sebab, jika mengacu pada riset Selvia dkk, pemahaman mahasiswa tentang moderasi beragama baik di PTU maupun PTKIN berada pada kategori sedang. Artinya pemahaman mereka tentang moderasi beragama cukup moderat

(Selvia et al., 2022). Lagi-lagi, penelitian tersebut tidak terkait langsung dengan dunia digital sebab hanya mengukur pemahaman mahasiswa tentang konsep moderasi beraga.

Berdasarkan studi literatur dan penelitian terdahulu, peneliti melihat adanya celah untuk melakukan kajian tentang “Penguatan Pengarusutamaan Beragama dalam Ruang Lingkup Digital bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi.” Penguatan moderasi beragama tidak boleh mengabaikan ruang digital yang telah menjadi dunia baru untuk lalu lalangannya informasi di era disrupsi. Fenomene demikian ini mengharuskan adaptasi pengarusutamaan beragama tidak hanya dalam ruang formal saja, melainkan ruang terbuka juga. Adapun sesuatu yang akan dijawab dalam penelitian ialah strategi dan langkah Penguatan Pengarusutamaan Beragama dalam Ruang Lingkup Digital bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi baik di PTKI dan PTU.

Artikel ini ditujukan untuk bagaimana transformasi dan transmisi moderasi beragama yang ada di PTKI dan PTN disalurkan dalam ranah digital sebagai ruang kontestasi merebut narasi keagamaan yang moderat dan toleran. Selain itu, artikel ini ditujukan untuk mengungkapkan bagaimana cara mewarnai dunia informasi digital yang ada di *cyber space* dengan isu-isu yang moderat.

METODE

Artikel ditulis dengan menggunakan metode kualitatif (*qualitative method*) dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber primer dalam penelitian ini ialah beberapa penelitian terdahulu, yang mengungkap beberapa kata kunci 1) pengarusutamaan beragama; 2) moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 3) moderasi beragama dalam ruang digital. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini di antaranya ialah beberapa kebijakan yang

telah diterbitkan Kementerian Agama, di antaranya: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 529 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 897 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama; buku Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan serta beberapa buku pendukung tentang moderasi beragama. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengikuti Miles & Huberman (Miles and Huberman, 1994, p. 16) reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian tersebut dirumuskan menjadi sebuah usulan kebijakan di Kementerian Agama Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Penguatan Moderasi di PTKI dan PTU

Pengarusutamaan beragama memiliki relevansi untuk dikokohkan atas dasar filosofi universal dalam konstruk pengembangan keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan juga di Perguruan Tinggi Umum (PTU). Hal ini sangat penting selain sebagai sarana tepat guna menyebarkan sensitivitas civitas akademika pada nalar perbedaan, namun juga sebagai strategi penguatan intelektualisme moderat di seluruh pendidikan tinggi di Indonesia agar tidak mudah menyalahkan pendapat yang berbeda (Hefni, 2020). PTKI dan PTU dalam konteks ini dapat menjadi *laboratorium* untuk penyemaian nilai-nilai moderat. Meskipun dalam sejarah perkembangannya, hanya PTKI didirikan sebagai kehendak untuk menciptakan model kajian dan pemahaman Islam yang inklusif, namun program moderat tidak hanya menjadi tanggung jawab PTKI saja, tetapi PTU juga turut menjadi wadah pembibitan aktor intelektual moderat yang harus dilibatkan.

Program moderasi beragama masih menjadi isu sentral yang hanya berkembang di Kementerian Agama saja, artinya dalam hal ini dalam

ruang lingkup PTKI saja, belum merambah pada PTU. Hal itu dibuktikan dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 897 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama. Rumah moderasi menjadi sentral gerakan moderasi beragama di setiap PTKI, namun keberadaannya masih absen di tengah PTU. Barulah di tahun 2022, PTU dilibatkan dalam sebuah bentuk program *Basic Leadership Training* Moderasi Beragama Mahasiswa Islam (Kemenag, 2022b). Dalam kegiatan itu, sejumlah 149 Mahasiswa dan 71 Dosen PAI dari 71 PTU yang dilibatkan.

Kegiatan moderasi beragama yang melibatkan PTU tidak sekuat di PTKI akar kebijakannya. Porsi Pendidikan agama Islam yang di ajarkan pada mahasiswa PTU hanya sebagai Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK). Setiap mahasiswa harus lulus MKWK PAI dan merupakan satu dari beberapa mata kuliah yang diwajibkan ditempuh oleh mahasiswa di PTU. Pendidikan agama Islam di PTU selayaknya sebagai wadah lingkungan dalam mengembangkan moralitas secara universal yang terdapat pada berbagai agama dan pada saat yang sama mengembangkan teologi yang inklusif dan pluralistik (Anwar and Muhayati, 2021). Dalam hal ini upaya dan langkah strategis perlu ditempuh antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk berkolaborasi menciptakan rumah moderasi di PTU.

Penguatan moderasi beragama selain untuk memperoleh wawasan keagamaan dan peningkatan literasi keagamaan ini, PTKI dan PTU memiliki perannya yang signifikan untuk mengkampanyekan moderasi beragama melalui *cyber space*. Saat ini, pemahaman masyarakat terhadap wacana religiusitas yang bertebaran cenderung mengalami bias. Ada golongan yang memahami ayat-ayat suci disertai fanatisme berlebihan dengan tekstualitasnya sehingga mengarah pada eksklusivisme. Ada golongan yang melampaui batas hingga kebablasan menafsirkan kitab suci. Ada pula golongan yang mempermainkan pesan-pesan

Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat kepentingan (Hefni, 2020). Konsekuensinya yang terjadi adalah rentannya konflik kepentingan yang dapat mengoyak tali harmoni kehidupan keagamaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi keharusan untuk dapat diviralkan, disebarluaskan, disosialisasikan, dan dilafalkan dalam ruangruang digital untuk diimplementasikan dalam tataran praktis kehidupan sehari-hari.

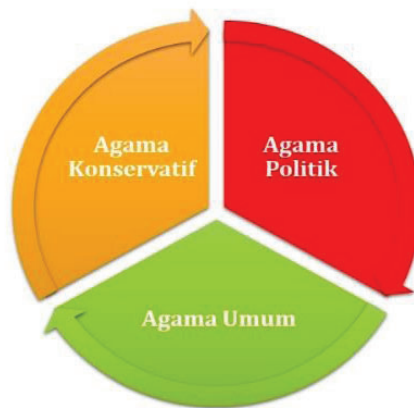
Moderasi Beragama dalam *Cyberspace*

Transformasi teknologi informasi telah menggiring konsep-konsep sosial seperti integrasi, kesatuan, persatuan, dan solidaritas dalam batas-batas yang kian mengkhawatirkan. Percaturan sosial-politik saat ini tidak lagi diikat dalam satu ideologi politik tertentu, melainkan individu-individu yang satu sama lain saling berlomba dalam sebuah arena kontestasi. Realitas sosial tenggelam dalam hutan rimba virtualitas. Inilah yang oleh Yasraf Amir Piliang disebut dengan abad *cyberspace* (Piliang, 2010).

Cyberspace atau ruang digital merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer untuk melipat ruang dan waktu dan menawarkan realitas baru berbentuk virtual. Dalam bahasa yang berbeda, *cyberspace* juga dapat diartikan sebagai suatu *imaginary location* 15 (tempat aktivitas elektronik dilakukan) guna meringkas dan memampatkan ruang-waktu (*time-space compression*). Pamadatan ini memiliki tujuan pasti untuk menghilangkan hambatan ruang (*spatial barriers*) menggunakan kecanggihan teknologi. Proses akhir yang dapat dihasilkan dari pemadatan ini adalah terjadinya percepatan dunia kehidupan (Harvey, 1992).

Dalam studi literatur yang dilakukan oleh peneliti, ada riset yang dilakukan oleh Halimatusa'diyah (2020) terkait topik keagamaan yang berkembang dalam ruang lingkup digital. Halimatusa'diyah melakukan analisis analisis *topic modelling* dengan data Twitter tahun 2009-

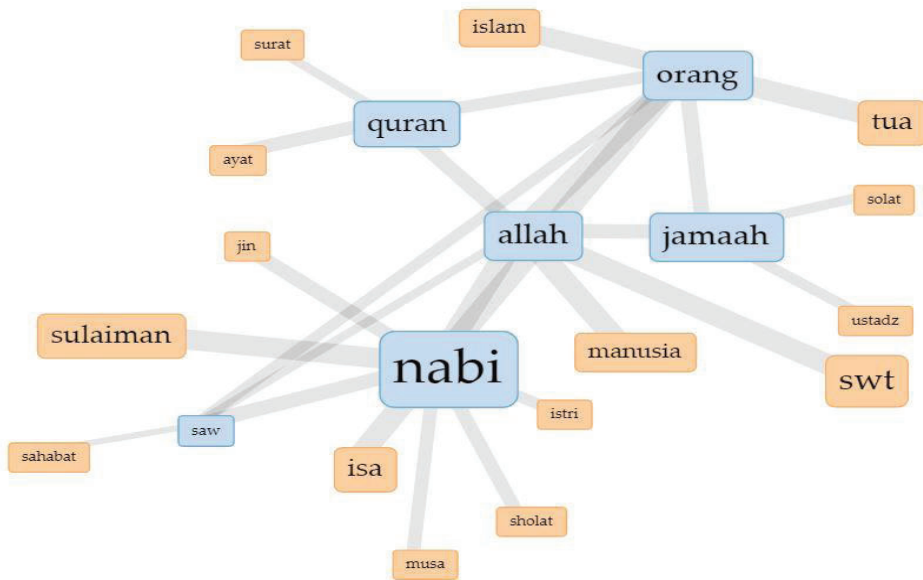
2019. Dari penelusuran tersebut ada tiga topik keagamaan yang muncul yakni topik keagamaan umum, keagamaan konservatif dan keagamaan politik. *Topik keagamaan umum* cenderung terkait dengan istilah-istilah keagamaan yang bersifat umum, narasinya bersifat netral tidak memojokkan kelompok tertentu dan cenderung berisi nasihat atau ekspresi keagamaan/kesholehan pribadi. *Topik keagamaan konservatif*, seperti terlihat dalam indikator yang digunakan dalam penelitian ini, lebih melihat narasi dan ekspresi keagamaan yang secara eksklusif membatasi pada tradisi masa Rasulullah dan sahabat awal dan cenderung menolak tradisi yang bersumber dari masa di luar itu. Selanjutnya, topik agama umum melihat kecenderungan penggunaan istilah, tema dan narasi keagamaan dalam narasi politik.



Gambar 1
Topik Keagamaan di Indonesia: Total tweet Tahun 2009-2019

Topik keagamaan di Twitter (Gambar 1) yang cenderung lebih variatif dan lebih mencakup topik yang diperdebatkan antar kelompok beragama, berbeda dengan topik keagamaan dengan menggunakan data video YouTube dengan tayangan tertinggi dari ustadz yang populer

menunjukkan topik keagamaan yang cenderung masuk kategori topik *keagamaan umum*. Hal ini menunjukkan bahwa video-video ustadz yang memperoleh tayangan paling banyak didominasi oleh narasi keagamaan yang cukup umum yang bisa diterima semua kalangan. Biasanya topiknya seputar praktik dan nasihat keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits serta tauladan-tauladan para nabi dan sahabat seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2.
Analisa Teks Video Ceramah di YouTube(PPIM, 2020)

Temuan Halimatusa'diyah tersebut menjadi bukti kuat adanya informasi dan wawasan keagamaan yang berlalulalang di ruang digital, mulai dari topik keagamaan umum, dan topik keagamaan konservatif, hingga topik keagamaan politik. Ramainya ruang lingkup digital tersebut tentu menjadi bagian dari belajar menyerap informasi di era baru, masalahnya jika ruang tersebut tidak diisi oleh orang yang kompeten dan

kapabel dalam bidang tersebut, maka topik keagamaan tersebut rawan menjadi alat untuk menggiring pada gerakan yang intoleran dan tidak moderat.

Kebijakan Moderasi Beragama

Kebijakan negara terhadap pendidikan agama dan keagamaan yang diterapkan pada sekolah maupun madrasah telah diatur dalam beberapa regulasi, baik regulasi yang diperuntukan secara umum yaitu sekolah dan madrasah, maupun regulasi yang bersifat khusus untuk madrasah. Kebijakan regulasi tersebut berkaitan erat dengan pembangunan pendidikan agama dan keagamaan dan penguatan moderasi beragama sebagai program jangka menengah nasional. Beberapa regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 529 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama pada Kementerian Agama.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam.
3. Edaran Ditjen Pendidikan Islam Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 897 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama;
5. Jalan Menuju Moderasi: Modul Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru yang telah diterbitkan Kementerian Agama RI
6. Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran PAI yang telah diterbitkan Kementerian Agama RI

Regulasi dan buku pedoman di atas memang telah moderasi beragama pendidikan agama dan keagamaan diberikan kepada siswa agar memiliki tingkat spiritual dan akhlak yang baik; memiliki toleransi dan moderasi beragama yang baik; upaya pembentukan rumah moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Tetapi secara operasional belum menunjukkan bagaimana aturan untuk penguatan moderasi beragama di kalangan mahasiswa di PTU. Pemerintah juga masih memerlukan regulasi update yang sesuai dengan perkembangan zaman, karena penguatan moderasi tidak hanya cukup dilakukan dalam ruang-ruang luring, tetapi juga harus benar-benar masuk dalam dunia virtual (*online*). Jika penguatan moderasi beragama tidak segera dikuatkan di PTU, karena PTU belum memiliki program rumah moderasi, maka jangan salahkan jika mereka para mahasiswa PTU akan berselanjar di dunia maya untuk belajar agama dan kembali menyebarkan apa yang mereka pelajari, padahal kebenarannya belum tentu otoritatif.

REKOMENDASI

Dalam rangka melengkapi regulasi yang telah ada sekaligus memberikan solusi bagaimana pengarusutamaan dalam moderasi beragama di dunia perguruan tinggi, maka diperlukan alternatif kebijakan yang dapat dijadikan rujukan. Beberapa langkah implementatif sebagai alternatif kebijakan antara lain sebagai berikut.

1. Kementerian Agama perlu bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk penguatan moderasi beragama, salah satunya dengan pendirian rumah moderasi beragama di PTU yang ada di Indonesia.
2. Kementerian Agama perlu bekerjasama menyusun kebijakan baru dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat peraturan moderasi beragama dalam ruang digital.

3. Jika buku panduan moderasi beragama untuk guru dan siswa telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, maka Kementerian Agama perlu menerbitkan buku panduan moderasi beragama untuk dosen dan mahasiswa di PTKI dan PTU.
4. Kementerian Agama perlu menyusun regulasi agar dapat melibatkan mahasiswa yang terbukti moderat untuk menjadi agen moderasi di dunia nyata dan di dalam ruang digital. Sehingga informasi keagamaan yang tersebar di dunia maya juga diwarnai dengan isu-isu moderat.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan dalam dua hal sebagai berikut:

- 1) Pengarusutamaan moderasi beragama di Pendidikan tinggi tidak bisa bergerak sendiri, namun harus berjalan beriringan untuk mencapai target yang diinginkan. Apa yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengarusutamakan moderasi beragama dalam ruang digital merupakan bentuk kesadaran yang menemukan relevansinya seiring isu-isu keagamaan di media sosial yang beredar luas dengan liar. Langkah yang serupa juga idealnya bisa diduplikasi di PTU dalam mengarusutamakan moderasi beragama dalam ruang digital. Untuk bisa bergerak Bersama ini dibutuhkan payung hukum yang dibangun atas kolaborasi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.
- 2) Pendidikan tinggi sebagai idealnya menjadi pencerah dalam banyaknya informasi keagamaan yang tidak memiliki sumber yang otoritas di *cyber space*. Para intelektual atau kaum akademisi di perguruan tinggi bisa turut andil meramaikan ruang digital (*cyber space*) dengan isu-isu yang moderat dan mendidik, agar informasi

yang dijadikan sandaran publik memiliki karakteristik untuk mengokohkan pemahaman keagamaan yang moderat, toleran dan penuh kasih sayang.

REFERENSI

- Abdul Aziz, A., Masykhur, A., Anam, A.K., Muhtarom, A., Masudi, I., Duryat, M., 2019. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Kementerian Agama, Jakarta.
- Anwar, R.N., Muhayati, S., 2021. Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi. *J. Pendidik. Islam* 12, 15.
- Halimatusa'diyah, I., 2020. *Bergama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Kegamaan di Indonesia*. PPIM UIN Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Harvey, D., 1992. *The Condition of Postmodernity an Enquiry Into the Origins of Cultural Change*. Blackwell, Wiley.
- Hefni, W., 2020. Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *J. Bimas Islam* 13, 1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Kemenag, 2022a. Tahun 2019 Sebagai Tahun Moderasi Beragama, Tahun Kebersamaan Dan Tahun Sadar Data [WWW Document]. dki.kemenag.go.id. URL <https://dki.kemenag.go.id/berita/tahun-2019-sebagai-tahun-moderasi-beragama-tahun-kebersamaan-dan-tahun-sadar-data> (accessed 9.15.22).
- Kemenag, 2022b. Kemenag Perkuat Moderasi Beragama Mahasiswa di PTU [WWW Document]. URL <https://pendis.kemenag.go.id/pai/berita-629-kemenag-perkuat-moderasi-beragama-mahasiswa-di-ptu.html> (accessed 9.15.22).
- Kemenag, 2019. *Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam*. Kementerian Agama, Jakarta.
- Kemenag, K., 2022. Menag Rilis Buku Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan [WWW Document]. URL <https://kemenag.go.id/read/menag-rilis-buku-pedoman-penguatan-moderasi-beragama-di-lembaga-pendidikan-egoxo> (accessed 9.15.22).

- Miles, M.B., Huberman, A.M., 1994. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nations, U., 2022. International Years [WWW Document]. U. N. URL <https://www.un.org/en/observances/international-years> (accessed 9.15.22).
- Piliang, Y.A., 2010. *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Matahari, Surabaya.
- PPIM, 2020. *Konservatisme di Dunia Maya: Bagaimana Mengkampanyekan Moderasi Beragama?* Policy Brief 4, 1–6.
- PPIM, 2018. Pendidikan Agama bagi Generasi Milenial di Perguruan Tinggi. Policy Brief Ser. 1, 1–9.
- Selvia, S., Rahmat, M., Anwar, S., 2022. *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terhadap Konsep Moderasi Beragama* 28, 9.
- Wahyudi, D., Kurniasih, N., 2021. *Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi “Jihad Milenial” Era 4.0*. Moderatio J. Moderasi Beragama 1, 1–20.